

Kantor-kantor Pemerintahan Diminta Tunda Halalbihalal Lebaran

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang saat ini menjabat sebagai Menteri Penguasaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Ad Interim, Mahfud MD, meminta kantor-kantor pemerintahan menunda acara halalbihalal.

Hal itu disampaikan dalam unggahan di akun Instagram resminya @mohmahfudmd pada Senin (24/4). “Selaku Menteri PANRB ad interim, secara resmi saya mengumumkan, semua kantor pemerintah, yakni Kantor Kementerian/Lembaga Non-Kementerian/

BUMN/TNI/POLRI, jika merencanakan Halal Bihalal dan sebagainya supaya ditunda sampai awal pekan kedua setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 H,” tulis Mahfud.

Mahfud juga meminta agar pada pekan pertama, yakni tanggal 24 - 30 April 2023 supaya tidak diadakan acara halalbihalal dan lain-lain (syawalan, reunion, dan sejenisnya) di tempat-tempat tersebut. Setelah rentang waktu itu, kata Mahfud, halalbihalal, syawalan, reunion, dan sejenisnya baru boleh mulai diadakan. “Surat resmi akan segera dikirim ke kantor dan instansi masing-masing. Sekian dan terima kasih,” ujar Mahfud. ● **mei**

Golkar Kekeh Usung Airlangga Sebagai Capres di Pilpres 2024

JAKARTA (IM) - Juru Bicara Partai Golkar, Tantowi Yahya, menegaskan, Partai Golkar tetap mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) 2024.

Hal itu dikatakan Tantowi ketika ditanya apakah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sudah dideklarasikan sebagai capres oleh PDI-P.

“Golkar tetap usung AH (Airlangga Hartarto) sebagai capres,” kata Tantowi kepada wartawan, Senin (24/4).

Menurut Tantowi, setiap partai politik di KIB, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga memiliki tokoh masing-masing yang didukung. Akan tetapi, dia yakin pada akhirnya KIB memiliki satu nama capres dan calon wakil presiden (cawapres) untuk diusung pada Pilpres 2024.

“Disepakati nanti akan

mengerucut ke satu nama untuk capres dan satu untuk cawapres,” ujarnya.

Tantowi mengatakan, setelah, KIB juga akan mengadakan silaturahmi dalam rangka Idulfitri dan konsolidasi. Dalam pertemuan itu, bisa saja dibahas mengenai pencapresan. Dia tak memungkir bahwa setelah Ganjar diusung PDI-P sebagai capres, dinamika politik semakin bergerak cepat.

“Belum tahu tempat dan tanggalnya (pertemuan KIB),” ucap Tantowi.

PDI-P pada Jumat (21/4) mengumumkan Ganjar sebagai capres 2024. Pengumuman itu disampaikan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Usai Ganjar diumumkan sebagai capres, sejumlah partai politik mendeklarasikan dukungan terhadap kader PDI-P itu, seperti Partai Hanura dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). ● **han**



FOTO: ANT

KUNJUNGAN KELUARGA DI LAPAS BANJARMASIN SELAMA IDUL FITRI

Warga binaan pemasyarakatan (WBP) memeluk anaknya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (24/4). Lapas Kelas II A Banjarmasin memberikan kelonggaran jam berkunjung bagi keluarga WBP agar bisa merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah bersama.

Setya Novanto Dapat Remisi, Masa Tahanan Dipotong 1 Bulan

JAKARTA (IM) - Terpidana kasus perkara korupsi proyek pengadaan KTP-elektronik (KTP-El) Setya Novanto, mendapatkan remisi pengurangan masa tahanan satu bulan. Remisi tersebut merupakan remisi khusus hari raya keagamaan dalam hal ini Idul Fitri 2023.

“Pak Setnov (Setya Novanto) dapat remisi satu bulan,” ujar Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa barat, Kusnali kepada wartawan, Senin (24/4).

Setya Novanto adalah satu dari 208 terpidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin yang mendapat remisi khusus lebaran.

Selain terpidana kasus korupsi, sebanyak 7.584 narapidana kasus narkoba, 7 narapidana kasus terorisme, 9 narapidana kasus perdagangan manusia (trafficking), dan 7.604 narapidana kasus pidana umum juga mendapatkan remisi.

Koordinator Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rika Aprianti mengatakan, sebanyak 146.260 dari 196.371 narapidana beragama Islam

menerima remisi khusus Lebaran 2023. Dari jumlah tersebut, 145.599 di antaranya menerima remisi khusus I.

Sementara itu, 661 narapidana lainnya menerima remisi khusus II.

“Penerima RK Idul Fitri 1444 H ini terdiri dari 79.374 orang pelaku tindak pidana tertentu dan 66.886 orang pelaku tindak pidana umum. Wilayah penerima remisi terbanyak yaitu Sumatera Utara sejumlah 15.515 orang, disusul Jawa Barat sebanyak 15.475 orang, dan Jawa Timur sejumlah 15.408 orang,” kata Rika.

Rika Aprianti mengatakan, pemberian remisi lebaran ini merefleksikan Idul Fitri sebagai kemenangan atas perjuangan melawan hawa nafsu. “Kemenangan ini juga berlaku bagi narapidana yang dengan serius terus bertobat dan memperbaiki diri,” ujarnya.

Sebagai informasi, Novanto merupakan terpidana perkara korupsi proyek pengadaan KTP-elektronik (KTP-el). Ia divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan ditambah kewajiban pembayaran uang pengganti 7,3 juta dolar AS. ● **mei**

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



PDI PERJUANGAN GELAR RAPAT PEMBAHASAN CAWAPRES

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers usai menggelar rapat internal di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (24/4). Rapat itu membahas terkait cawapres untuk Pilpres 2024, koalisi partai jelang pilpres, caleg PDI Perjuangan, dan situasi perpolitikan nasional.

IDI Siap Bela dr Zainal Muttaqin yang Dipecat dari RSUP Kariadi

Dokter juga merupakan bagian dari rakyat yang berhak menyuarakan kegelisahannya.

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi menegaskan bahwa IDI siap membela Prof Zainal Muttaqin, PhD, SpBS(K), yang dipecat dari RSUP Kariadi, Semarang, baru-baru ini.

Pemecatan Zainal deari RSUP Kariadi diduga lantaran kerap mengkritik kebijakan pemerintah, salah satunya soal Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan.

Namun menurut Adib, tulisan Zainal selama ini tidak seluruhnya berupa kritik, tetapi ada pula yang memberikan pemahaman kepada masyarakat.

“Tulisan-tulisan Prof Zainal Muttaqin, PhD, SpBS(K) di laman pribadinya di Kumparan.com selama ini tidak hanya mengkritik Kementerian Kesehatan, tetapi

juga menjelaskan banyak kesalahpahaman publik pada organisasi profesi dan situasi kesehatan di Indonesia,” ujar Adib dilansir dari siaran pers IDI, Senin (24/4).

Sesuai dengan hak warga negara yang dilindungi dalam UUD 1945 yaitu kebebasan berpendapat, mengeluarkan pikiran sebagai akademis dan intelektual, seharusnya tulisan Zainal tidak disikapi dengan cara-cara yang sangat disayangkan.

Zainal termasuk dokter bedah saraf dengan kekhuisan yang langka di bidang keilmuan epilepsi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Selain itu, selama ini Zainal aktif sebagai pengajar menghasilkan dokter spesialis bedah saraf yang jumlahnya masih sangat sedikit di Indonesia.

“PB IDI melalui Bidang Hukum Pembelaan dan Pem-

binaan Anggota (BHP2A) PB IDI dan IDI Wilayah Jawa Tengah akan melakukan pendampingan hukum, dan memperjuangkan hak-hak sebagai anggota IDI dan warga negara Indonesia,” ujar Adib.

Sementara itu, Ketua IDI Wilayah Jawa Tengah dr Djoko Handoyo, Sp. B-onk juga menyalurkan penghormatan Zainal. Menurutnya, persoalan kritik tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dulu.

“Kami berharap masalah ini semestinya dapat didiskusikan secara kekeluargaan terlebih dahulu oleh oleh semua pihak yang terlibat,” ujar Djoko.

“Beliau bukan hanya sejawat kami, tetapi juga Guru Besar dan dokter spesialis bedah saraf yang pengorbanannya sangat besar dalam menangani pasien-pasien yang membutuhkan bantuan operasi saraf selama masa kritis pandemi Covid-19 lalu,” katanya.

Djoko mengatakan, semestinya pemerintah tidak

melupakan pengorbanan para dokter dan semua tenaga kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19. Sebab, pernah bersama-sama bahu membahu hingga bisa mencapai situasi seperti saat ini.

“Janganlah jasa-jasa Beliau dan juga tenaga kesehatan lainnya juga organisasi profesi dilupakan hanya karena kritik yang bertujuan agar pemerintah kita menjadi lebih baik lagi,” ujar Djoko.

Guru Besar Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI-Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) Ari

Fahrial Syam mengatakan, para dokter juga merupakan bagian dari rakyat yang berhak menyuarakan kegelisahannya.

Dia menilai, upaya pembungkaman yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Kementerian Kesehatan melalui pemberhentian Zainal Muttaqin menciderai proses demokrasi yang dikembangkan oleh pemerintah sendiri. “Mudah-mudahan tindakan-tindakan represif seperti ini tidak berlanjut yang akan memperkeruh keadaan dan yang akan dirugikan adalah pasien-pasien dan peserta didik Beliau dan masyarakat pada umumnya,” kata Ari. ● **han**

Heboh, Peneliti BRIN Ancam “Halalkan Darah Muhammadiyah Akhirnya Minta Maaf

JAKARTA (IM) - Warganet di media sosial dihebohkan tulisan pada status facebook peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang dinilai mengerikan. Ungkapan itu muncul di tengah perdebatan soal hari Lebaran Muhammadiyah, Jumat (21/4).

Persoalan berawal dari status Facebook yang ditulis Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN, Thomas Djamaluddin.

Ia mengaku heran dengan Muhammadiyah yang tak taat dengan keputusan Lebaran yang ditetapkan pemerintah.

Eks Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) itu heran warga Muhammadiyah minta difasilitasi lapangan untuk salat Idul Fitri.

“Eh, masih minta difasilitasi tempat sholat Id. Pemerintah pun memberikan fasilitas,” ujar Thomas dalam status yang viral dikutip Senin (24/4).

Status Thomas ditanggapi anak buahnya yang merupakan pakar astronomi BRIN, Andi Pangerang Hasanuddin. Melalui akun AP Hasanuddin, ia menuliskan kemarahan atas sikap Muhammadiyah dengan mention akun Ahmad Fauzan S.

“Kalian Muhammadiyah, meski masih jadi saudara seiman kami, rekan diskusi lintas keilmuan tapi kalian sudah kami anggap jadi musuh bersama dalam hal anti-TBC (takhayul, bidah, churofat) dan keilmuan progresif yang masih egosektoral. Buat apa kalian berbangga-bangga punya masjid, panti, sekolah, dan rumah sakit yang lebih banyak dibandingkan kami kalau hanya egosentris dan egosektoral saja?” kata Hasanuddin.

Ia melanjutkan komentarnya dengan nada ancaman setelah berdebat dengan warganet lain. “Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalen-

der Islam global dari Gema Pembebasan? Banyak bacot emang!!! Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian,” kata Andi.

Perihal itu, ketika Thomas dihubungi mengaku tidak tahu komentar yang mana.

“Saya tidak tahu itu yang dikomentari Andi itu, itu kan Andi dengan Ahmad Fauzan ya. Saya cari lagi di kolom komentar, saya sudah tidak menemukan, mungkin sudah dihapus. Entah diperdebatkan apa, ya tapi terkait soal perbedaan itu sih. Saya tanya lagi ke Andi, itu komentar asalnya apa sih. Dia juga sudah lupa, dan ketika dicari lagi sudah tidak ada. Siapa yang menghapus juga belum tahu,” ucap Thomas kepada wartawan, Senin (24/4).

Meski demikian, Thomas mengaku sudah menegur Andi. Menurut Thomas, Andi juga sudah menulis permintaan maaf.

“Tentu saya tegur, itu berlebihan. Terus dia menyatakan dia menyesal dan dia menulis surat permintaan maaf,” kata Thomas.

“Dugaan saya karena jengkel saja. Hanya saya tidak tahu yang membuat dia jengkel hingga keluar kata-kata berlebihan itu saya tidak tahu,” imbuhnya.

Sebelumnya perihal unggahan itu dibagikan di media sosial oleh Rektor Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma'mun Murod.

Setidaknya ada 4 tangkapan layar yang dibagikan Murod dengan caption sebagai berikut:

“Pak Presiden @jokowi Prof. @mohmahfudmd, Pak Kapolri @ListyoSigitP @DivHumas_Polri, Gus Menag @YaqutCQoumas, Kepala @brin_indonesia bgmn dg ini semua? Kok main2 ancam bunuh? BRIN sbg lembaga riset hrsnya diisi mereka yg menampakkan keintelektualannya, bkn justru spt preman.” ● **han**

TNI: Pratu F Gugur Bukan Ditembak OPM, tapi Jatuh dari Tebing Sedalam 140 Meter

JAKARTA (IM) - Mabes TNI menyebut, Pratu F, prajurit yang sempat dinyatakan hilang setelah peristiwa penembakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di Distrik Mugi, Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu (15/4), ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia.

Namun dipastikan bahwa Pratu G gugur bukan lantaran ditembak TPNPB-OPM.

“Jatuh dari tebing berkedalaman 140 meter,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Laksamana Muda Julius Widodo, kepada wartawan, Senin (24/4).

Penyebab kematian Pratu F itu terkonfirmasi karena tidak ditemukannya luka tembak pada jasad personel dari Satgas Yonif R 321/Galuh Taruna tersebut.

“Tidak ada luka tembak, benar,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, jasad Pratu F ditemukan tim gabungan TNI dan Polri kurang lebih sepekan setelah peristiwa penembakan terjadi.

Jasad Pratu F langsung dievakuasi ke Timika, untuk selanjutnya dibawa ke RSUD untuk pemulasaraan jenazah.

Jasad mending rencananya akan diterbangkan ke kampung halamannya di Magelang, Jawa Tengah.

● **mei**



FOTO: ANT

LIBUR LEBARAN DI BEKAS PENINGGALAN TSUNAMI

Warga mengamati bekas bangunan Masjid Terapung yang ambruk ke laut akibat gempa dan tsunami di Pantai Kampung Lere di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (24/2). Saat musim libur Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah sejumlah kawasan terdampak bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di daerah tersebut ramai dikunjungi warga terutama dari luar daerah yang datang untuk melihat langsung dampak dari bencana yang terjadi pada 2018 tersebut.